

INTISARI

Pengembangan agropolitan di kabupaten sumenep melalui komoditas unggulan yaitu bawang merah mengalami alur pemasaran yang Panjang mulai dari petani ke tengkulak lalu ke pengepul besar lalu ke penjual eceran dan baru sampai ke konsumen, walaupun menjadi komoditas unggulan namun ditngkat lokal terdapat mata rantai pasar yang perlu ditangani sehingga harga stabil Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan agropolitan dalam perspektif *local economic resources development* di kabupaten sumenep, metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dengan Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Simpulan dalam penelitian ini adalah (1) tata pemerintahan, di tingkat kabupaten telah terbentuk pengembangan kawasan agropolitan yang telah ditetapkan dalam SK Bupati sumenep nomor 188/37/KEP/435.013/2011 Dinas Pertanian sebagai wakil pengembangan kawasan agropolitan dalam kelompok kerja yang dibantu oleh balai penyuluh pertanian kecamatan rubaru, (2) bawang merah hasil pertanian dari petani diproses menjadi produk sampai ke pemasaran melalui Kelompok Usaha Bersama Permata Indah Rubaru, (3) kelompok sasaran, masyarakat petani bawang merah dan pelaku usaha bawang merah, (4) faktor lokasi, tanaman bawang merah di rubaru lebih tahan penyakit pada saat musim hujan dan sangat cocok dengan faktor alam dikecamatan rubaru, (5) keterkaitan dan fokus kebijakan, peraturan daerah nomor 12 tahun 2013 dan SK Bupati Nomor 188/37/KEP/435.013/2011 sebagai fokus kebijakan dan Dinas Pertanian yang berperan secara teknis juga memberikan pelatihan forum dan praktik dilapangan yang dibantu oleh Balai Penyuluh Pertanian Rubaru (6) pembangunan berkelanjutan, melalui optimalisasi lahan kelompok usaha bersama yang mencakup ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kata Kunci: Pengembangan Agropolitan, *Local Economic Resources Development*, Kabupaten Sumenep

ABSTRACT

Agropolitan development in Sumenep district through a superior commodity, namely shallots, experiences a long marketing flow starting from farmers to middlemen then to large collectors then to retail sellers and then to consumers, even though it is a superior commodity, at the local level there are market chains that need to be handled so that stable prices. This research aims to find out how agropolitan development is from a local economic resources development perspective in Sumenep district. The method in this research uses a qualitative approach with data collection techniques using observation, interviews and documentation. The data analysis technique used in this research is, collection, data, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The conclusions of this research are (1) governance, at the district level, the development of agropolitan areas has been established which has been stipulated in the Decree of the Regent of Sumenep number 188/37/KEP/435.013/2011. The Department of Agriculture as the representative for the development of agropolitan areas in the working group assisted by the Balai Rubaru sub-district agricultural instructor, (2) agricultural shallots from farmers are processed into sales and then marketed through the Permata Indah Rubaru Joint Business Group, (3) target groups, shallot farming communities and shallot business actors, (4) location factors, Shallot plants in Rubaru are more disease resistant during the rainy season and are very compatible with natural factors in Rubaru sub-district, (5) linkages and policy focus, regional regulations number 12 of 2013 and Regent's Decree Number 188/37/KEP/435.013/2011 as the focus policy and the Department of Agriculture, which plays a technical role, also provides forum and practical training in the field, assisted by the Rubaru Agricultural Extension Center (6) for sustainable development, through optimizing joint business group land which includes the economy, social and environment.

Keywords: Agropolitan Development, Local Economic Resources Development, Sumenep Regency